

**PROSES PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU
SENAPELAN**

OLEH :

DISIPRIANDES

No. Mhs : 00772000469



**PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN PERUSAHAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2010**

PROSES PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Pada Program Diploma III Manajemen Perusahaan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau*

OLEH :

DISIPRIANDES
No. Mhs : 00772000469



**PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN PERUSAHAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2010**

ABSTRAK

PROSES PENAGIHAN PAJAK DENG N SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

OLEH :

DISIPRIANDES

NIM : 00772000469

Dari tahun ke tahun peranan pajak dalam pembiayaan APBN terus meningkat. Kondisi ini menunjukkan tugas Direktorat Jenderal Pajak menjadi semakin berat. Salah satu upaya penting dalam mengamankan penerimaan Negara dari sektor pajak adalah tindakan penagihan atas tunggakan pajak yang dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dimulai dengan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak maka dilakukan suatu pemeriksaan dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak (SKP), apabila Wajib Pajak tidak segera melunasi hutang pajak yang telah ditetapkan dalam SKP tersebut maka akan menimbulkan adanya tunggakan pajak.

Dari tunggakan yang belum dilunasi tersebut, kemudian akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penagihan. Pelaksanaan penagihan itu sendiri diawali dengan melakukan pendekatan persuasif, yaitu dengan menghimbau para Wajib Pajak yang masih mempunyai tunggakan agar segera melunasi tunggakan pajaknya tersebut. Namun apabila pendekatan persuasif tersebut masih belum mendapat respon dari Wajib Pajak untuk segera melunasinya, maka pihak KPP menindaklanjutinya dengan pelaksanaan Penagihan Aktif, yaitu dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sampai dengan pelaksanaan Lelang. Sebagai objek dalam penyusunan proposal atau skripsi minor ini adalah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sebagai instansi pemerintah yang terkait dalam memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6
1. Lokasi Penelitian.....	6
2. Jenis dan Sumber Data.....	6
a. Data primer	6
b. Data sekunder.....	7
3. Metode Pengumpulan Data	7
a. Obsevasi	7
b. Interview	7
c. Penelitian Pustaka.	7
4. Analisa Data	8
E. Sistematika Penulisan	8
 BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Berdirinya KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	10
B. Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	13
C. Aktivitas KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	15
 BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
A. Tinjauan Teori	17
1. Pengertian Pajak	17
2. Pengertian Penagihan dan Dasar Dilaksanakan Penagihan .	19
a. Pengertian Penagihan	19

b. Dasar Dilaksanakannya Penagihan	20
3. Pengertian Penagihan Aktif	21
4. Pengertian Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak	23
B. Tinjauan Praktek	25
1. Penagihan Pajak	25
a. Surat Teguran	26
b. Surat Paksa	27
c. Penyitaan Pajak	29
d. Pelelangan	31
2. Penagihan dengan Surat Paksa	33
3. Jenis Pungutan Pajak	34
a. Pajak Orang Pribadi	34
b. Pajak Badan	34
c. PPN & PPnBM	34
d. Pajak Bumi dan Bangunan	36
e. Pajak Daerah	36
f. Pajak bea cukai	37
g. Entisitas Bisnis	37
4. Prosedur Pembayaran Pajak	37
 BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	
A. Analisa Penagihan Dengan Surat Paksa	39
B. Kebijakan Penagihan	40
C. Kebijakan Penagihan Pajak	40
D. Kebijakan Penagihan Pajak Pada Tahun 2008	42
 BAB V KESIMPILAN DAN SARAN	
A. kesimpulan	50
B. Saran	51
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merta diseluruh tanah air, memerlukan dana yang memadai terutama salah satunya dari sumber perpajakan disamping sumber-sumber lainnya. Oleh karenanya, arah kebijakan pembangunan nasional saat ini dibidang ekonomi adalah mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, afisiensi, efektivitas untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri.

Mengenai pajak dan pungutan lainnya, amandemen ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1995 memberikan ketentuan baru pada pasal 23A UUD 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan Undang-Undang. Dengan berlakunya Undang-Undang perpajakan inilah menunjukkan bahwa pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara disektor pajak. Pemerintah sangat beralasan untuk mengoptimalkan penerimaan dari pajak karena sumber dari luar pajak cenderung merosot sering dengan krisis multi dimensi yang melanda Indonesia sejak tahun 1998 lalu. Sehingga pajak memegang berperan sangat penting dan strategis dalam penerimaan negara.

Seperti yang kita sadari semua bahwa pembangunan nasional yang khususnya bidang ekonomi tidak terlepas dengan kebijakan dibidang perpajakan baik pusat maupun daerah. Pajak penghasilan sebagai pajak pusat merupakan sumber terbesar dan mengalami peningkatan yang signifikan dalam penerimaan negara tiap tahunnya.

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Menerima atau memperoleh penghasilan atau keuntungan semaksimal mungkin merupakan tujuan utama dalam menjalankan kegiatan usaha

(bisnis) sehari-hari dalam dunia usaha yang dilakukan oleh para pengusaha atau investor dalam negeri dan luar negeri. Didalam dunia bisnis ini tentu tidak terlepas dari pengawasan aparatur pemerintah sesuai bidang usaha atau pekerjaannya masing-masing. Begitu juga aparatur pajak tentu akan mengawasi semua pengusaha atau investor khususnya pengawasan pajak dalam rangka pemeriksaan pajak guna menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan atas tiap penghasilan tersebut atau untuk tujuan lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000.

Hasil akhir dari pemeriksaan pajak guna menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut adalah Ketetapan Pajak. Ketetapan pajak berupa surat ketetapan pajak dalam kondisi kurang bayar (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar / SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambah / SKPKBT, kondisi lebih bayar (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar / SKPLB), atau nihil (Surat Ketetapan Pajak Nihil / SKPN). Dalam rangka proses pengeluaran atau penerbitan ketetapan inilah awal dapat timbul sengketa pajak dengan berbagai kemungkinan, yakni terjadinya perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak (fiskus dengan wajib pajak) atas penerapan peraturan perundang-undang perpajakan yang biasanya menimbulkan perbedaan hasil perhitungan besarnya pajak yang terutang yang dianggap Wajib Pajak tidak benar, tidak memenuhi prosedur, sehingga Wajib Pajak merasa keberatan atas ketetapan pajak tersebut yang dibuat, dikeluarkan atau diterbitkan oleh fiskus / petugas pajak, dan pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat selaku Wajib Pajak, sehingga dapat mengakibatkan timbul sengketa pajak antara Wajib Pajak dan pejabat yang berwenang. Dengan meningkatnya jumlah wajib pajak dan pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Visi, Menjadi Model Pelayanan Masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Misi, menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Untuk mewujudkan ini, Direktorat Jenderal Pajak menjalankan Strategi meningkatkan penguasaan atas Subjek dan Objek Pajak, penyempurnaan perundang-undangan perpajakan, peningkatan pengetahuan perpajakan masyarakat dan peningkatan kepatuhan perpajakan masyarakat, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka merumuskan kebijakan perpajakan yang mendukung pengembangan, perbaikan keunggulan kompetitif Indonesia dan mengembangkan kebijakan perpajakan yang kondusif dan merangsang investasi, tidak lupa juga melaksanakan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang inovatif dan memiliki kemampuan untuk mendukung pelaksanaan misi dan strategi serta peningkatan atau modernisasi sarana dan prasarana kerja.

Target-target penerimaan pajak selama ini selalu ditekankan pada pemenuhan *tax ratio* dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak, peningkatan angsuran bulanan perpajakan khususnya pajak penghasilan dan memantau kepatuhan Wajib Pajak membayar setoran masa, pemantauan setoran akhir tahun Wajib Pajak serta melakukan pemeriksaan membuat pelaksanaan penagihan seperti kegiatan sampingan diantara kegiatan-kegiatan yang padat tersebut. Padahal pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas yang memicu terbitnya Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dimana dalam surat-surat tersebut tercantum hutang pajak yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak. Pada kenyataannya, tunggakan pajak semakin hari semakin besar. Peningkatan tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan pelaksanaan pencairannya sehingga timbullah “piutang-piutang negara” dalam bentuk

pajak. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam pelaksanaan akuntansi perusahaan, piutang dimasukkan ke dalam aktiva lancar dan diharapkan bisa diubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun (piutang lancar) begitu juga dalam perpajakan diharapkan tunggakan-tunggakan perpajakan ini, dapat segera dilunasi dan menjadi penerimaan yang terealisasi dan dapat digunakan untuk pembangunan negara kita. Untuk menunjang tertagihnya tunggakan pajak tersebut, maka dipandang perlu dilaksanakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum memaksa, sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang No. 19 tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 inilah yang mengatur serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Pelaksanaan penagihan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak. Walaupun sampai saat ini pelaksanaan penagihan pajak lebih dititik-beratkan pada Wajib Pajak Besar yang membuat sistem penagihan pajak terlihat sangat kaku, tetapi untuk memperluas basis penagihan dan menaikkan penerimaan, pemerintah kini memandang perlu untuk meyakinkan pelaku usaha kecil untuk membayar kewajiban perpajakannya melalui Kantor Pelayanan Pajak Kecil (*Small Tax Payer Office/ STPO*).

Penulis sangat menyadari betapa potensialnya kegiatan penagihan dalam merealisasikan penerimaan pajak, sehingga penulis berkeinginan membuatnya sebagai suatu objek penelitian yang diberi judul “PROSES PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN”.

B. Perumusan Masalah

Sebagai mana penjelasan dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah yaitu “Bagaimana Proses penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan”.

C. Tinjauan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui Proses penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

2. Manfaat penulisan

- a. Sebagai sarana penambahan wawasan penulisan dengan melihat praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan yang berhubungan dalam Proses Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.
- b. Mungkin dapat menjadi suatu masukan tambahan ilmu perpajakan khususnya pelaksanaan penagihan bagi masyarakat Wajib Pajak.
- c. Bagi penulis, dapat membandingkan antara peraturan-peraturan perpajakan dengan praktek yang terjadi di lapangan sehingga dapat menambah pemahaman atas masalah perpajakan khususnya penagihan pajak.

D. Metodologi Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

2. Jenis dan Sumber data

- a. Data primer

Data primer yaitu Data yang penulis peroleh dari wawancara langsung dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan mengenai kegiatan penagihan pajak yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari tulisan-tulisan, laporan-laporan, ataupun dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa pengertian pajak pertambahan nilai, pengertian pajak, pengertian penagihan dan dasar dilaksanakannya penagihan pajak serta prosedur dan tata cara penyelesaian upaya hukum wajib pajak

3. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pemetaan langsung atau lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan terhadap para Staf atau Pegawai.

b. Interview

Interview yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru senapelan dalam melengkapi data.

c. Penelitian Pustaka

Penelitian Pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan data berupa buku-buku, membaca data atau laporan-laporan dan arsip-arsip dari pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan untuk menelaah permasalahan yang ditemui analisis deskriptif, yaitu dengan menggambarkan teori-teori yang relevan atau membandingkan kenyataan yang ada dengan teori dan selanjutnya membuat kesimpulan dan saran yang diperlukan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan praktek ini secara garis besar terdiri dari IV bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, batas masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan

BAB II : Gambaran Umum lokasi Penelitian

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, mulai dari Sejarah Singkat Kantor, Struktur Organisasi dan Aktifitas kantor.

BAB III : Tinjauan Teoritis

Bab ini menguraikan tentang teori Proses penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dimulai dengan tinjauan teoritis mengenai pengertian pajak secara umum dan fungsi pajak, pengertian Penagihan serta subjek dan objek, Proses penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Serta tinjauan praktek yang yakni prosedur Proses Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini diuraikan tentang pelaksanaan penagihan pajak, pelaksanaan tindakan penyitaan harta kekayaan atau harta milik wajib pajak, tata

cara penyitaan dan laporan pelaksanaan penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

BAB V : Kesimpulan Dan Saran

Merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang memuat kesimpulan dari perbandingan hasil penelitian dengan teori yang ada serta memuat saran-saran dari peneliti.

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

Sejarah singkat berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan. Wilayah kerja setiap kantor Pelayanan Pajak telah dibagi berdasarkan kecamatan sehingga dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap Wajib Pajak. KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sendiri membawahi kota pekanbaru seluruhnya kecuali kecamatan tampan dengan satu Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Perpajakan di Pekanbaru Timur. KPP Pekanbaru Senapelan berada di jalan Jenderal Sudirman No. 247 Pekanbaru tepatnya berada di gedung B dan C. Bangunan kantornya, bersatu dengan Kantor Wilayah dan Kantor Pemeriksaan Pajak Pekanbaru. KPP Pekanbaru Senapelan ini didirikan sejak tahun 1964, mengalami perpecahan wilayah tugas pada tahun 2002 sehingga kini ada KPP pratama pekanbaru senapelan dan KPP Pekanbaru Tampan. KPP Pekanbaru Senapelan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPP Pekanbaru Senapelan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenanganya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, KPP Pratama Pekanbaru Senapelan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi Wajib Pajak.
2. Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Pemberitahuan masa serta berkas Wajib Pajak.
3. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, PPN, PPnBM dan pajak tidak langsung lainnya.
4. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, PPN, PPnBM, dan pajak tidak langsung lainnya.
5. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.
6. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
7. Pembetulan Surat Ketetapan Pajak.
8. Pengurangan sanksi administrasi.
9. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan.
10. Pelaksanaan administrasi KPP.

Dalam memenuhi penerimaan yang diembannya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan melaksanakan kebijaksanaan :

- a. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak yang kooperatif seperti fasilitas pengurangan hutang, mengangsur hutangnya dan pelayanan lain menyangkut Wajib Pajak.

- b. Menghimbau Wajib Pajak agar membayar pajaknya tepat waktu atau sebelum jatuh tempo pembayarannya.
- c. Percepatan pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan Percepatan penyelesaian proses keberatan yang diajukan Wajib Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan dahulu bernama Kantor Inspeksi Pajak Pekanbaru yang memisahkan diri dari Kantor Inspeksi Keuangan di Padang tahun 1964, Wilayah kerjanya pada waktu itu meliputi Riau Daratan dan Kepulauan.

Pada tanggal 1 Januari 1967 Kantor Inspeksi pajak Pekanbaru terpecah menjadi 5 Bagian :

1. Kantor Pelayanan Pajak Batam
2. Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru
3. Kantor Pelayanan Pajak Dumai
4. Kantor Pelayanan Pajak Rengat
5. Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Pinang

Berdasarkan Kep MenKeu No.443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan dipecah menjadi 2 bagian :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan
2. Kantor Pelayanan Pajak Tampan

Wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Senapelan adalah daerah administrasi pemerintah Kota Pekanbaru kecamatan Tampan, yang terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dan 44 (empat puluh empat) kelurahan, meliputi :

1. Kecamatan Sukajadi, terdiri dari 8 kelurahan.
2. Kecamatan Sail, terdiri dari 3 kelurahan.
3. Kecamatan Rumbai, terdiri dari 7 kelurahan.
4. Kecamatan Bukit Raya, terdiri dari 10 kelurahan.
5. Kecamatan Pekanbaru Kota, terdiri dari 6 k Kecamatan
6. Kecamatan Lima Puluh, terdiri dari 4 kelurahan.
7. Kecamatan Senapelan, terdiri dari 6 kelurahan.

Serta membawahi satu Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan Pekanbaru Timur.

B. Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Dalam menjalankan fungsi tersebut, KPP Pekanbaru Senapelan dibagi dalam sembilan seksi yaitu seksi Sub-Bagian Umum, seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP), seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP), seksi Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan), seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (P2PPH), seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PPN & PTLL), seksi Penagihan dan seksi Penerimaan dan Keberatan (Pen-Keb). Adapun seksi penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penagihan, penundaan dan angsuran, dan pembuatan usulan penghapusan piutang pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan terdiri dari 9 (Sembilan) seksi dan 23 (dua puluh tiga) koordinator pelaksana, yaitu:

1. Sub Bagian Umum
 - a. Korlak Tata Usaha dan Kepegawaian
 - b. Korlak Keuangan
 - c. Korlak Rumah Tangga
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
 - a. Korlak Pengolahan Data Informasi I
 - b. Korlak Pengolahan Data Informasi II
 - c. Korlak Pengolahan Data Informasi II
3. Seksi Tata Usaha Perpajakan
 - a. Korlak Pelayanan Terpadu
 - b. Korlak Surat Pemberitahuan Pajak
 - c. Korlak Ketetapan dan arsip Wajib Pajak
4. Seksi Pajak Orang Pribadi
 - a. Korlak PPh Orang Pribadi I
 - b. Korlak PPh Orang Pribadi II
5. Seksi Pajak Penghasilan Badan
 - a. Korlak PPh Badan I
 - b. Korlak PPh Badan II
6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan
 - a. Korlak Pemotongan dan Pemungutan PPh I
 - b. Korlak Pemotongan dan Pemungutan PPh II
7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Tidak Langsung Lainnya
 - a. Korlak PPN Industri
 - b. Korlak PPN Perdagangan

8. Seksi Penagihan

- a. Korlak Tata Usaha Piutang Pajak
- b. Korlak Penagihan Aktif

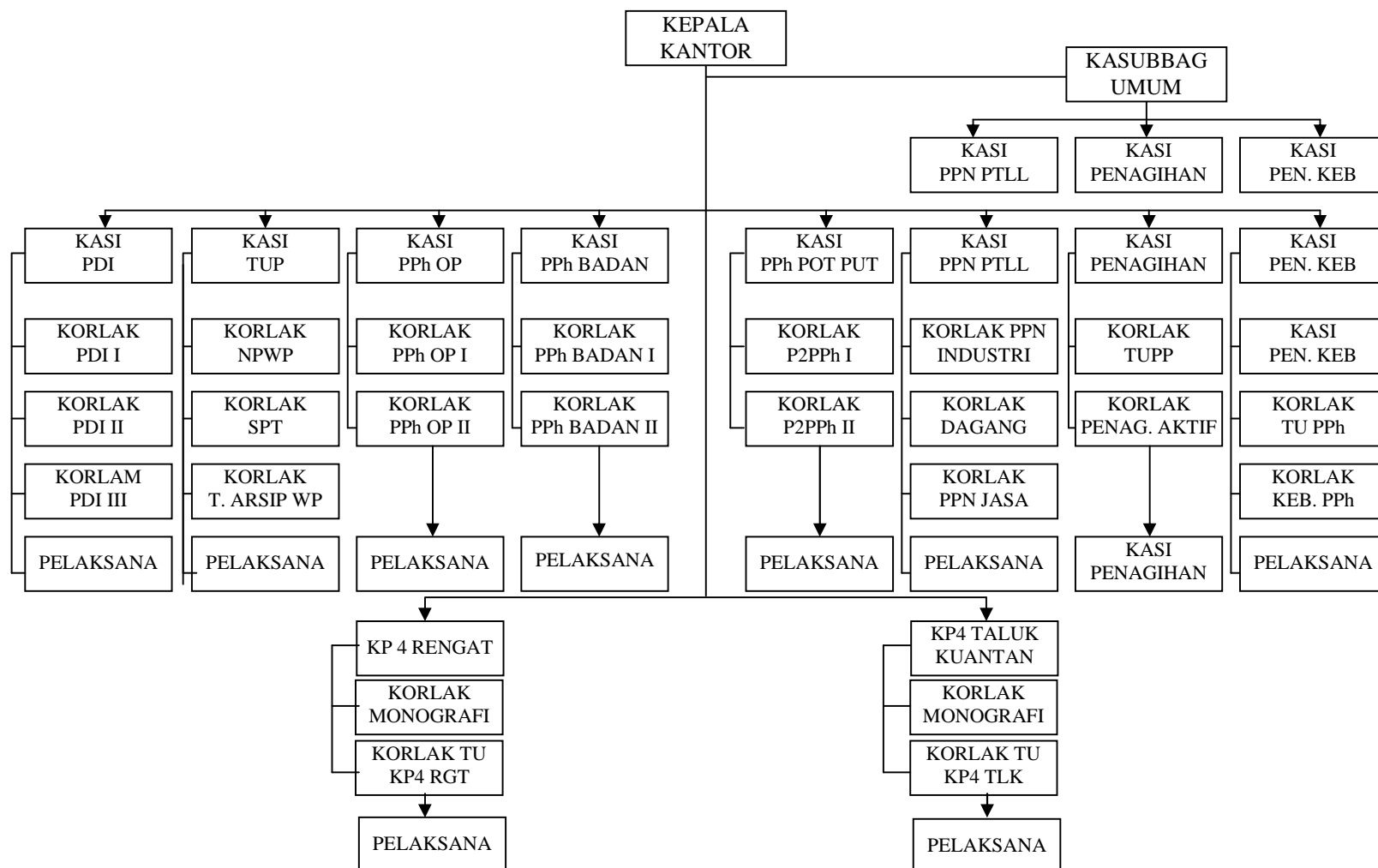
9. Seksi Penerimaan dan Keberatan (Pen-Keb)

C. Aktivitas KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Adapun aktivitas dari Kantor Pelayanan Pajak ini adalah memberikan dan melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak dibidang pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu juga melakukan penerbitan surat ketetapan pajak, pembetulan surat ketetapan pajak, pengurangan sanksi pajak, penyuluhan dan konsultasi piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding dan penyelesaian restitusi pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainnya.

Gambar II.1 truktur Organisasi
Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan



BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Pajak

Beberapa ahli dibidang perpajakan mendefinisikan dan menjelaskan pengertian dari pajak antara lain adalah :

Menurut Prof. Dr.Mardiasmo.MBA.AK Yokyakarta, hal 1, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pajak menurut S.I. Djajaningrat seperti yang dicantumkan dalam buku perpajakan yang dikutip oleh S.Munawir (1999:1) adalah:

Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara, disebabkan oleh suatu keadaan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, digunakan untuk kesejahteraan umum.

Pajak menurut PJA. Andriani, seorang guru besar hukum pajak Universitas Amsterdam mendefinisikan pajak sebagai mana dikutip oleh Aini (1997:2) :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak. Pembayaranannya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum seperti pembangunan jembatan, jalan dan lain-lain.

Jika mengacu kepada UU nomor 28 tahun 2007 tentang KUP pada pasal 1 ayat 1 :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa unsur-unsur yang melekat dalam pengertian tersebut yaitu :

- a. Kontribusi/Iuran wajib kepada negara
- b. Berdasarkan Undang-Undang
- c. Sifatnya memaksa
- d. Tidak mendapat imbalan langsung
- e. Digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai mana telah diketahui dari definisi pajak tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pajak mempunyai dua fungsi yaitu :

- a. Fungsi penerimaan (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, seperti: Pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

- b. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasarkan dunia.

2. Pengertian Penagihan dan dasar dilaksanakan Penagihan Pajak

a. Pengertian Penagihan

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 135 Tahun 2000 pasal 1 ayat (4) penagihan dapat diartikan sebagai berikut :

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberikan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.

Secara konseptual menurut Bohari (2002:120) mengemukakan bahwa :

Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 7 UU No. 19 Tahun 2000 dikatakan bahwa surat Paksa berkepal kata-kata “BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, MEMPUNYAI KEKUATAN eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap. Berdasarkan kata-kata “DEMI KEADILAN”, maka Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuasaan hukum yang pasti sudah dapat dilaksanakan.

b. Dasar Dilaksanakannya Penagihan

Pada hakekatnya STP/SKPKB/SKPKBT TERMASUK SK Pembetulan/SK Keberatan, putusan Banding merupakan dasar penagihan pajak. Meskipun dalam Undang-undang perpajakan wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terhutang (*self assesment*) Dirjen Pajak dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terhutangnya pajak, dapat mengeluarkan STP/SKPKB/SKPKBT.

- 1) STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa bunga dan benda administrasi.
- 2) SKPKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kekurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang harus dibayar.
- 3) SKPKBT adalah surat keputusan yang menambah jumlah pajak yang telah ditetapkan.

3. Pengertian Penagihan Aktif

Untuk mencairkan tunggakan-tunggakan perpajakan yang semakin menumpuk setiap tahunnya, maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan kegiatan penagihan. Sampai sejauh ini, apa sebenarnya yang dimaksud dengan penagihan?. Jika diteliti dalam kamus besar Bahasa Indonesia maka Penagihan adalah “Proses, cara, perbuatan menagih; permintaan (peringatan dsb) supaya membayar utang, tuntutan supaya menagih janji”, pengertian penagihan menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 (Salemba Empat 2001 : 212) adalah :

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan

penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Pada Prinsipnya, penagihan pajak dapat dilakukan atas dasar Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak dalam hal ini Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), serta Surat Ketetapan sejenis yang memuat besarnya jumlah utang pajak. Dalam surat-surat di atas, dicantumkan tunggakan pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak biasanya beserta sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga. Ketika tanggal pembayaran telah jatuh tempo dan Wajib Pajak belum juga melunasi kewajibannya, fiskus akan melakukan usaha penagihan dengan menerbitkan Surat Teguran atau bahkan sampai melelang harta Wajib Pajak yang bersangkutan. Usaha penagihan ini dikenal dengan sebutan Penagihan Aktif yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 561/KMK.04/2000.

Dalam penelitian penagihan dengan surat paksa ini, penulis menitikberatkan penagihan yang berdasarkan pada terbitnya STP dan SKP berupa SKPKB dan SKPKBT karena kedua dasar inilah yang sering ditemui dalam Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan beberapa dasar lainnya seperti yang telah disebutkan di atas dapat kita temui pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang untuk masa ini wewenang pekerjaannya masih dipisahkan tetapi dalam waktu dekat dengan adanya modernisasi pelayanan pada Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan akan berada pada satu atap yang sering dikenal dengan sistem *one stop service*. Saat penulis melakukan penelitian pada Kantor

Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan, KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dirubah menjadi Kantor Pelayanan dengan basis pelayanan modern ditandai dengan dirubahnya nama KPP menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Sedang untuk dasar-dasar penagihan berkenaan dengan pajak-pajak daerah wewenanganya berada pada pemerintah daerah setempat.

4. Pengertian Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak

Kedua pengertian ini dapat kita baca dan pahami pada Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1994 dan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 14 dan 19 (Salemba Empat 2001 : 5) sebagai berikut :

Pasal 14 yaitu Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.

Pasal 19 yaitu Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Pada item Surat Ketetapan Pajak, yang menjadi penyebab penagihan, adalah yang menerangkan jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah yang telah dibayar, sanksi administrasi, dan pajak yang masih harus dibayar (utang pajak) yang tertuang pada SKPKB dan SKPKBT sedangkan SKPKLB menerangkan adanya kredit pajak yang lebih besar dari yang seharusnya terutang pada Wajib Pajak mengakibatkan terjadinya restitusi pajak ataupun kompensasi pada tahun pajak berikutnya. Sedang SKPN menerangkan jumlah pokok dan kredit pajak yang sama besar, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1994 dan Undang-undang No. 16 Tahun 2000

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, STP dapat diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
- b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
- d. Perusahaan dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak.
- f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak. (Salemba Empat 2001 : 12)

Dari ketentuan diatas, dapat kita pilih bahwa dasar untuk membuat STP berkaitan penerimaan Pajak Penghasilan adalah butir a, b, c sedangkan butir d, e, f bersangkutan dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Sedangkan dasar atas terbitnya SKP khususnya SKPKB dan SKPKBT dapat dilihat pada pasal 13 dan pasal 15 Undang-undang yang sama. SKPKB diterbitkan dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun pajak atas kondisi-kondisi sebagai berikut :

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

- b. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) (batas waktu pelaporan SPT Masa dan Tahunan) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
- c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen).
- d. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (Pembukuan) dan Pasal 29 (Pemeriksaan) tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. (Salemba Empat 2001 : 11-12)

SKPKBT sesuai pasal 15 undang-undang yang sama mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diterbitkan dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, *apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang.* (Salemba Empat 2001 : 13)

B. Tinjauan Praktek

1. Penagihan Pajak

Penagihan dilaksanakan oleh seorang Jurusita Pajak. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, pengertian jurusita tercantum dalam pasal 1 angka 6 sebagai berikut :

“Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan” dimana tugas-tugas Jurusita Pajak adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
2. Memberitahukan Surat paksa.
3. Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.

Ketika hutang pajak yang tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan dan putusan banding tidak dibayar sesuai tanggal jatuh tempo maka kegiatan penagihan aktif wajib dijalankan oleh Kantor Pelayanan Pajak bersangkutan dengan urutan sebagai berikut :

a. Surat Teguran

- 1) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, dalam pasal 1 ayat 10 disebutkan Pengertian Surat Teguran yaitu: Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran diterbitkan tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo yang tertera pada STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan dan Putusan Banding.
- 2) Surat teguran disampaikan kepada wajib pajak segera setelah saat pelunasan terakhir / jatuh tempo pembayaran, yakni setelah lebih dari satu bulan dari tanggal surat yang dimaksud.

- 3) Tanggal dan nomor surat teguran dicatat dalam buku registrasi surat teguran. Buku register pengawas penagihan, Buku Register Tindakan Penagihan, dan Tindakan STP/SKPKB/SKPKBT.

b. Surat Paksa

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, dalam pasal 1 ayat 12 disebutkan Pengertian Surat Paksa yaitu : surat perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa diterbitkan dua puluh satu (21) hari dari tanggal surat teguran. Surat paksa dalam hukum disebut "*parate ecsecutie*" yang berarti bahwa penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa proses pengadilan negeri. Surat paksa juga mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan dapat dilanjutkan dengan penyitaan apabila wajib pajak tetap tidak mengindahkan utang pajak yang tercantum dalam surat paksa tersebut.

Isi surat paksa harus memuat nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak, dasar penagihan, besarnya utang pajak dan perintah untuk membayar. Ada tiga kriteria mengapa Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Paksa yaitu :

- 1) Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- 2) Terhadap Penanggung Pajak, telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- 3) Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa untuk Wajib Pajak Perseorangan diberitahukan kepada Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain yang memungkinkan, dapat juga diberikan kepada orang dewasa yang tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak.

Apabila Penanggung Pajak telah meninggal dunia, Surat Paksa diberitahukan kepada para ahli waris bila harta warisan telah terbagi. Jika harta warisan belum terbagi, Surat Paksa diberitahukan kepada salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya.

Surat Paksa untuk Wajib Pajak Badan diberitahukan kepada pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal di tempat usaha, di tempat tinggal atau dimanapun yang memungkinkan. Bila orang-orang yang disebutkan diatas tidak ada, Surat Paksa tetap dapat disampaikan kepada pegawai tetap yang di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan.

Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.

c. Penyitaan Pajak

Jangka waktu surat paksa ke tindakan penyitaan adalah 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa kepada penanggung pajak. Sesuai dengan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, pasal 14 ayat 1 disebutkan Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak atau ditempat lain maupun yang penguasaannya berada di tangan pihak lain. Walaupun Jurusita diberikan wewenang untuk dapat menyita semua barang bergerak maupun tidak bergerak milik Penanggung Pajak, tetapi dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, pasal 14 ayat 2 Jurusita harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga Jurusita tidak melakukan penyitaan secara berlebihan tetapi jika nilai barang yang disita tidak

dapat melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau hasil lelang barang tidak mencukupi untuk melunasi biaya penagihan dan utang pajak maka dapat dilaksanakan penyitaan tambahan.

Penyitaan dilaksanakan Jurusita Pajak dengan didampingi minimal dua orang saksi yang telah dewasa, orang Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya. Kehadiran para saksi dimaksud untuk meyakinkan bahwa penyitaan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak/ Penanggung Pajak, penyitaan tetap dapat dilakukan dengan syarat salah seorang saksi berasal dari Pemda setempat lalu berita acara penyitaan ditanda-tangani Jurusita Pajak dan saksi-saksi. Berita acara tetap mempunyai kekuatan mengikat meski Wajib Pajak/Penanggung Pajak menolak menandatangani.

Atas barang-barang yang disita, pada dasarnya harus ditempelkan segel penyitaan kecuali barang yang sifatnya tidak dapat ditemplei segel sita misalnya, uang tunai atau sebidang tanah. Penempelan segel sita pada barang, menurut Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa pada Pasal 12 ayat 8 dimaksudkan sebagai pengumuman bahwa penyitaan telah dilaksanakan, baik dihadiri ataupun tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak.

Tetapi ada barang-barang yang dikecualikan dalam penyitaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yaitu :

- 1) Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya.
- 2) Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah.
- 3) Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari Negara.

- 4) Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan.
- 5) Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah tidak lebih dari Rp. 20.000.000.
- 6) Peralatan penyandang cacat yang digunakan penanggung pajak atau keluarga yang ditanggungnya.

Penyitaan yang telah dilaksanakan dapat dicabut, apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

d. Pelelangan

Selanjutnya setelah empat belas hari dari tanggal Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, aparat pajak (pemerintah) menyusun jadwal pelelangan ke kantor lelang negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pasal 26 Ayat 1b dijelaskan pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali. Pengumuman lelang pada media massa dilakukan terhadap barang dengan nilai diatas Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Empat belas hari setelah pengumuman lelang, dilakukanlah pelaksanaan lelang. Tujuan utama lelang, tercantum dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa pada Pasal 28 ayat 2 disebutkan untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan tetap memberi perlindungan kepada Penanggung Pajak

agar lelang tidak dilaksanakan berlebihan. Oleh karena itu, hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membiayai penagihan pajak yang belum dibayar lalu sisanya untuk membayar utang pajak. Sehingga bila ada sisa barang sitaan dan kelebihan uang hasil lelang, maka Pejabat mengembalikan nya kepada Penanggung Pajak segera setelah dibuatnya Risalah Lelang sebagai tanda bahwa lelang telah selesai dilaksanakan. Perlu diingat hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya.

Selain proses penagihan yang telah disebutkan di atas, Direktorat Jenderal Pajak juga dapat melaksanakan upaya penagihan yang meliputi Pencegahan dan Penyanderaan. Pencegahan disini adalah melakukan pelarangan agar Penanggung Pajak tidak bepergian ke luar negeri jadi diperlukan kerjasama dengan Kantor Imigrasi, Pencegahan dilakukan berdasarkan keputusan yang diterbitkan oleh Menteri. Penyanderaan adalah upaya penagihan dengan mengekang Penanggung Pajak untuk sementara waktu dan menempatkannya pada tempat tertentu. Penyanderaan hanya dilaksanakan secara sangat selektif, hati-hati, dan merupakan upaya terakhir. Dalam kenyataan, pencegahan masih lebih sering dilakukan dari pada penyanderaan walaupun didalam undang-undang syarat kuantitatif melakukan kedua hal tersebut, bila utang Penanggung Pajak sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan syarat kualitatif Penanggung Pajak nyata-nyata diragukan itikad baik dalam melunasi utang pajaknya.

2. Penagihan dengan Surat Paksa

Penagihan dengan surat paksa yang dilakukan pada waktu ini berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2000. Undang-undang ini bermaksud menyempurnakan Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.

Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa ini adalah suatu bentuk eksekusi tanpa peraturan hakim (yang menjadi wewenang fiskus) yang lazimnya dinamakan eksekusi langsung.

Surat Paksa mempunyai kekuatan sama dengan *groose* (asli) putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diganggu gugat lagi dengan meminta banding kepada hakim yang lebih atas Surat Paksa menggunakan kepada “Atas Nama Keadilan”. Karena perkataan itulah Surat Paksa mendapat kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dijalankan, dan kekuatan itu dididapkannya karena keadilan semata-mata untuk memerintahkan pelaksanaan itu.

Yang berwenang mengeluarkan Surat Paksa itu adalah :

- a. Untuk Pajak Negara, dikeluarkan oleh KPP yang bersangkutan.
- b. Untuk Pajak Daerah dikeluarkan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 Jam Wajib Pajak tidak menghiraukan Surat Paksa yang telah diberikan kepadanya maka segera diadakan tindak lanjutnya.

Tindak lanjut itu pada pokoknya terdiri atas dua peraturan hukum yaitu :

- a. Penyitaan.
- b. Pencegahan dan penyanderaan.

1. Jenis Pungutan Pajak

a. Pajak orang pribadi

Untuk Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan 25.000.000	5%
25.000.000-50.000.000	10%
50.000.000-100.000.000	15%
100.000.000-200.000.000	25%
Diatas 200.000.000	30%

b. Pajak Badan

Untuk Pajak Badan dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
Sampai dengan 50.000.000	10%
50.000.000-100.000.000	15%
Diatas 100.000.000	30%

c. PPN & PPnBM

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan jasa kena pajak didalam Daerah yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah dan didalam daerah.
- e. Pemanfaatan Barang Kena Pajak dari luar daerah dan didalam daerah.
- f. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Pengusaha kecil dibebaskan dari kewajiban PPN sehingga tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak, kecuali apabila pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Undang-undang PPN berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut.

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan :

- a. Barang kena pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- b. Jasa kena pajak dengan jumlah penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- c. Dalam hal pengusaha melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan penerimaan bruto tidak lebih dari :

Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) jika penerimaan Jasa Kena Pajak lebih dari 50% dari jumlah seluruh peredaran bruto dan penerimaan bruto.

Tarif PPN & PPnBM

- 1) Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen)
- 2) Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)
- 3) Tarif PPN dan PPnBM atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen)

d. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak PBB dikenakan apabila :

1. Untuk klasifikasi bumi memperlihatkan letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan dan lain-lain.
2. Untuk bangunan memperlihatkan bahan yang digunakan, rekayasa letak, kondisi lingkungan.
3. Tanah atau bangunan semata-mata untuk digunakan melayani kepentingan umum dan dimaksudkan tidak untuk mendapatkan keuntungan.
4. Tanah dan gedung yang ditempati oleh perwakilan deplomatik/konsulat, (asas timbal balik).
5. Bagunan yang ditempati oleh perwakilan organisasi internasional.
6. Tanah yang bernilai jual obyek pajak kurang dari Rp. 8.000.000,00 (nilai jual obyek pajak tidak kena pajak).

e. Pajak Daerah

1. Pajak Propinsi
 - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
 - b. Pajak bahan bakar kendaraan.
 - c. Pajak pemanfaatan dan pengambilan air bawah tanah dan permukaan bumi.
2. Pajak Kabupaten
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran

- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan

Jenis barang	Tarif
Pajak kendaraan	5%
Pajak bahan bakar	5%
Pajak pemanfaatan air	20%
Pajak hotel	10%
Pajak restoran	10%
Pajak hiburan	35%
reklame	25%
Penerangan jalan	10%

f. Pajak bea cukai

Pajak bea material bisa disebut juga pajak atas dokumen penting, bea material dikenakan pajak apabila dokumen tersebut memuat jumlah harga nominal lebih dari Rp. 1.000.000,00

g. Entisitas Bisnis

Entisitas bisnis adalah merupakan kumpulan pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak dan dimasukkan ke APBN

2. Prosedur Pembayaran Pajak.

Setiap perusahaan yang telah mendapat izin usaha maka diwajibkan untuk membayar pajak, baik pajak tahunan maupun pajak bulanan. Pajak harus dibayar di Bank-bank yang telah ditunjuk oleh Departmen Keuangan (Bank Persepsi) misalnya Bank BNI, BRI, Mandiri, selain di Bank pajak juga bisa dibayar di Kantor Pos Indonesia. Ini untuk memudahkan pembayaran pajak.

Semua uang yang ada di Bank-bank yang ditunjuk oleh Departmen Keuangan yang dibayar oleh Wajib Pajak disetorkan ke APBN, dan Uang tersebut dikelola oleh APBN menurut prosedur yang telah ditetapkan.

Wajib Pajak harus memperhatikan beberapa hal yaitu :

- a. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya, SPT tahunan pajak penghasilan yang tidak ditandatangani berarti SPT yang bersangkutan tidak sah.
- b. SPT tahunan pajak penghasilan harus disampaikan oleh Wajib Pajak ke kantor Pelayanan pajak, kantor penyuluhan pajak setempat, sedangkan kekurangan pembayaran pajak yang terhutang harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada waktu yang telah ditentukan.
- c. Untuk menghindari keadaan yang kurang menyenangkan (antri terlalu panjang, berdesakan, dan sebagainya), maka disarankan agar menyampaikan SPT tahunan Pajak penghasilan segera mungkin dan tidak menunda-nunda sampai hari-hari terakhir menjelang.
- d. Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban SPT tahunan Pajak Penghasilan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Analisa Penagihan Dengan Surat Paksa

Undang-undang penagihan telah ada sejak tahun 1959 yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa, tetapi reformasi perpajakan menuntut agar undang-undang yang dibuat negara tidak berat sebelah membela hak antara masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara sehingga keluarlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa lalu diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dimana ada penegasan jadwal penagihan aktif yang dimulai dari surat teguran dan berakhir dengan pelelangan. Sama seperti perlakuan dalam akuntansi keuangan, tagihan pajak dalam suatu kantor pelayanan pajak disamakan kedudukannya dengan piutang. Untuk tujuan laporan keuangan, piutang dibagi menjadi piutang lancar yang diharapkan dapat di klaim dalam jangka satu tahun atau selama satu siklus operasi berjalan. Piutang tidak lancar piutang yang umurnya lebih dari satu tahun atau lebih dari satu siklus operasi berjalan.

STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan dan putusan banding tidak dibayar sesuai tanggal jatuh tempo maka tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo diterbitkan surat teguran. Dua puluh satu hari setelah tanggal surat teguran, diterbitkan surat paksa. 2 x 24 jam setelah surat paksa di lakukan penyitaan atas barang-barang penanggung pajak selanjutnya empat belas hari dari tanggal Surat Perintah Melakukan Penyitaan dilanjutkan dengan meminta jadwal lelang ke Kantor Lelang Negara empat belas hari dari tanggal pengumuman lelang dilakukan pelelangan. Beginilah urutan kegiatan penagihan yang terjadi di tiap Kantor Pelayanan Pajak baik yang konvensional maupun yang modern.

B. Kebijakan Penagihan

Setiap tahunnya, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan suatu surat edaran khusus yang mengatur mengenai penagihan dimana diatur kriteria umur tunggakan pajak, standar prestasi tindakan penagihan, target pencairan tunggakan pajak per Kantor Wilayah. Dari ketetapan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak ini terlihat betapa tinggi harapan agar tunggakan-tunggakan pajak ini dapat direalisasikan menjadi penerimaan pajak sehingga dapat dipakai oleh negara untuk menambah kemakmuran rakyat.

C. Kebijakan Penagihan Pajak

Untuk mengoptimalkan pencairan tunggakan pajak dan mendukung rencana penerimaan pajak tahun 2008 maka ditetapkan prosedur Kebijakan Penagihan Pajak Tahun 2008 yang tertuang dalam SE-01/ PJ.75/2008 sebagai berikut :

1. Untuk tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit sebelum tahun 2008, alokasi dana ditetapkan perkanwil. Rencana ini ditetapkan berdasarkan sisa tunggakan dari ketetapan yang terbit dalam tahun 2008 dan sebelumnya.
2. Untuk tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit tahun 2008 rencana pencairan tunggakan pajaknya adalah minimal sebesar 50%
3. Ditetapkan standar prestasi pelaksanaan kegiatan penagihan pajak tahun 2008 adalah sebagai berikut :
 - a. Penyampaian Surat Paksa : 12 SP per Jurusita per bulan
 - b. Penyampaian SPMP : 3 SPMP per Jurusita per bulan
 - c. Pelaksanaan Lelang : 1 Lelang per Triwulan per KPP
 - d. Pemblokiran Rekening Bank : minimal 1 Wajib Pajak per bulan per KPP

e. Pencegahan

e.1 Bagi Kanwil DJP yang berada di pulau jawa minimal 2 Wajib Pajak per Triwulan per Kanwil

e.2 Bagi Kanwil DJP yang berada di luar pulau jawa minimal 1 Wajib Pajak per Triwulan per Kanwil

Selain ketentuan-ketentuan penting sebagaimana tertulis diatas, Surat Edaran Dirjen Pajak tersebut juga memberi jalan keluar bagi KPP yang kekurangan Jurusita untuk mengangkat Jurusita selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Juga di tekankan agar tiap seksi penagihan mempunyai kendaraan operasional sendiri untuk menunjang kegiatan penagihan. Juga memberikan tugas baru untuk Kanwil DJP agar membentuk bank data yang memuat harta kekayaan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayahnya, melakukan kesepakatan kerjasama dengan Pihak Polri/ Menteri Kehakiman dan HAM RI/ Gubernur/ Walikota/ Bupati dan Bank Indonesia.

Tabel 4.1
Matriks Standar Prestasi Tindakan Penagihan

No	Tindakan Penagihan	SP Per JSPN	SPMP Per JSPN	Lelang Per KPP	Pemblokiran Per KPP	Pencegahan Per KPP
		Per Bulan	Per Bulan	Per Bulan	Per Bulan	Per Bulan
1	KPP WP Besar dan KPP Madya	3	1	1	1	1
2	KPP di Lingkungan Kanwil Khusus	12	3	2	3	2
3	KPP di kota besar di P.Jawa dan Sumatera*)	10	2	2	2	1
4	KPP lainnya di P.Jawa	8	2	1	1	1
5	KPP lainnya**)	6	1	1	1	1

Catatan :

*) Kota Besar adalah Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Serang, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Malang, Sidoarjo.

**) KPP yang tidak termasuk no. 1, 2, 3, 4

Berdasarkan prestasi yang dicapai Kantor Pelayanan Pajak, Direktorat Pemeriksaan Penidikan dan Penagihan Pajak mengupayakan realisasi insentif untuk Juru Sita Pajak Negara. Selain memberikan penghargaan juga diberikan sanksi bagi pegawai yang tidak melakukan tindakan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Kebijakan Penagihan Pajak Pada Tahun 2008

Dalam Kebijakan Penagihan Pajak Tahun 2008, pencairan tunggakan dilakukan secara optimal melalui kegiatan operasional penagihan antara lain :

1. Tertib Administrasi

a. Dengan menertibkan administrasi pada seksi penagihan dengan cara menyelenggarakan perekaman data dan penyimpanan berkas terkait penagihan pajak secara tertib serta menjaga pemutakhiran data tunggakan pajak. Setiap seksi penagihan juga harus menetapkan umur tunggakan pajak pertahun terbitnya ketetapan pajak yang menjadi dasar tunggakan pajak. Selain menetapkan umur tunggakan pajak, juga ditetapkan kriteria kualitas tunggakan pajak ke dalam 5 kelompok yaitu lancar, kurang lancar, dalam perhatian khusus, diragukan dan macet. Agar mudah melihat trend pencairan tunggakan, tunggakan juga diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi lapangan usaha.

b. Mengupayakan agar semua biaya penagihan pajak dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak dibebankan kepada Wajib Pajak dan disetor ke Kas Negara dengan menggunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak dan kode MAP 0555

2. Kegiatan Penagihan

Selain tertib administrasi, ditekankan pula agar tiap Kantor Pelayanan Pajak untuk :

- a. Melaksanakan tindakan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Menetapkan prioritas tindakan penagihan pada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang bidang usahanya mempunyai prospek cerah.
 - c. Penyitaan aset Wajib Pajak/ Penanggung Pajak diprioritaskan pada kekayaan berupa *monetary assets* seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, piutang atau tagihan, obligasi, saham dan surat berharga lainnya.
 - d. Melakukan analisis (bedah) tunggakan yang dilanjutkan dengan pemanggilan terhadap minimal 10 penunggak pajak terbesar.
3. Pengawasan Administrasi dan Tindakan Penagihan

Rencana pencairan tunggakan pajak nasional ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit sebelum tahun 2008, alokasi rencana pencairan tunggakan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak diatur tersendiri. Rencana ini ditetapkan berdasarkan sisa tunggakan dari ketetapan yang terbit dalam tahun 2008 dan sebelumnya.
- b. Untuk tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit selama tahun 2008, rencana pencairan tunggakan pajaknya adalah minimal sebesar 50%.

Besarnya tunggakan pajak dari tahun ke tahun membuat pengawasan pencairannya harus lebih intens dilakukan tidak hanya oleh Kantor Pelayanan Pajak bersangkutan tetapi juga oleh Kantor wilayah Pajak yang membawahi. Dengan membuat laporan pelaksanaan penagihan pajak terhadap 1000 penunggak pajak terbesar nasional Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak yang berada di Kantor Pusat DJP juga ikut melakukan pengawasan. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pelaksanaan tindakan penagihan.

4. Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*).

Standar prestasi penagihan pajak KPP tahun 2008 dihitung berdasarkan beberapa variable yaitu :

- a. Realisasi pencairan tunggakan pajak (pembayaran dan pemindahbukuan) ;
- b. Saldo akhir tunggakan pajak per KPP
- c. Pertumbuhan tunggakan pajak (tunggakan pajak pada tahun berjalan dibanding tunggakan pajak tahun sebelumnya)
- d. Prosentase pengurangan tunggakan pajak karena adanya keputusan keberatan/ banding/ gugatan/ putusan Mahkamah Agung/ keputusan pembetulan ketetapan/ keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/ keputusan pengurangan atau pembetulan ketetapan
- e. Standar prestasi pelaksanaan kegiatan penagihan sesuai dengan ketetapan yang dibuat untuk tahun 2008 sesuai dengan tabel dibawah

Tabel I.I Laporan Kegiatan Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan Triwulan I (Januari s.d Maret) Tahun 2008

No	WP	STP/SKPKB/ SKPPKBT/SK. Pemb/SK Keb/Putusan Banding yang belum lunas	Jumlah Surat Teguran		Surat Paksa		SPMP	
			LBR	RP	LBR	RP	LBR	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Badan	52.554	621	14.411.932	27	14.374.387	-	-
2	OP	28.099	351	576.267	6	377.482	-	-
Jumlah		80.653	972	14.988.199	33	14.751.869	-	-

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

Tabel I.II Laporan Kegiatan Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan Triwulan II (April s.d Juni) Tahun 2008

No	WP	STP/SKPKB/ SKPPKBT/SK Pemb/SK Keb/Putusan Banding yang belum lunas	Jumlah Surat Teguran		Surat Paksa		SPMP	
			LBR	RP	LBR	RP	LBR	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Badan	159	-	-	-	-	-	-
2	OP	9	-	-	-	-	-	-
Jumlah		168	-	-	-	-	-	-

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

Tabel I.III Laporan Kegiatan Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan Triwulan III (Juli s.d September) Tahun 2008

No	WP	STP/SKPKB/ SKPPKBT/SK. Pemb/SK Keb/Putusan Banding yang belum lunas	Jumlah Surat Teguran		Surat Paksa		SPMP	
			LBR	RP	LBR	RP	LBR	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Badan	-	25	-	2	-	-	-
2	OP	-	23	-	-	-	-	-
Jumlah		-	48	-	2	-	-	-

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

Tabel I.IV Laporan Kegiatan Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan Triwulan IV (Oktober s.d Desember) Tahun 2008

No	WP	STP/SKPKB/ SKPPKBT/SK Pemb/SK Keb/Putusan Banding yang belum lunas	Jumlah Surat Teguran		Surat Paksa		SPMP	
			LBR	RP	LBR	RP	LBR	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Badan	-	68	-	80	-	-	-
2	OP	-	14	-	12	-	-	-
Jumlah		-	82	-	92	-	-	-

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui total jumlah Surat teguran sampai Triwulan IV Tahun 2008 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan adalah 1270 Lembar, sementara total Surat Paksa yang disampaikan sampai dengan Triwulan IV adalah 515 lembar, dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan yang dilaksanakan adalah berjumlah 2 Lembar.

Terlihat semakin mendekati pelaksanaan sita jumlah tunggakan hutang pajak yang belum dilunasi semakin besar. Berarti kegiatan penagihan yang dilakukan oleh juru sita pajak negara sebagai ciri ditetapkannya *Law Enforcement* berjalan tidak efektif.

Laporan yang dibuat ini diteruskan kepada kepala Penagihan untuk diteliti dan diparaf, dan kemudian diteruskan lagi Kepada Kantor Pelayanan Pajak untuk ditandatangani, Laporan Pelaksanaan Penagihan dikirim ke Kantor Wilayah atasan yaitu Kanwil II (sumbagteng) sesuai dengan jadwal/waktu yang ditentukan.

Perlu diketahui bahwa suatu Hutang pajak/ tunggakan pajak dapat dikatakan lunas jika penanggung pajak membayar hutang tersebut atau dengan melakukan pemindahbukuan karena adanya restitusi kelebihan pajak dari tahun sebelumnya. Pembayaran hutang pajak itu bisa secara mengangsur atau dibayar sekaligus. Untuk pembayaran angsuran, diperbolehkan dengan ijin kepala kantor. Pembayaran angsuran ini diperkenankan bagi penanggung pajak yang belum diberikan tindakan surat paksa, dan biasanya pengangsuran ini diberikan pada penanggung pajak yang beritikad baik yang biasanya dilakukan dengan tindakan *soft collection*. Pengajuan Pengangsuran diperbolehkan 15 (lima belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran hutang pajak berakhir. Lamanya pengangsuran diijinkan paling banyak 12 (dua belas) bulan atau paling lama sampai dengan bulan terakhir tahun pajak berikutnya. Tetapi pemberian angsuran tidak berarti membuat sanksi berupa bunga penagihan dihapus, bunga penagihan tetap dihitung sebesar 2% (dua persen) dari tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sampai tanggal pelunasan angsuran tiap bulannya.

Selain alasan diatas, diterimanya keberatan, permohonan pembetulan ataupun usul banding yang diajukan penanggung pajak dapat pula mengakibatkan pencairan hutang pajak. Sebenarnya dalam menagih hutang pajak, jurusita sangat meminimalisir terjadinya lelang barang, pencegahan ataupun penyanderaan karena untuk mencairkan hutang pajak dengan tindakan sampai tahap pelelangan, pencegahan ataupun penyanderaan memakan waktu yang cukup lama juga menelan biaya penagihan yang besar, walaupun pada akhirnya biaya tersebut menjadi tanggungan penanggung pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya mengenai analisis penagihan dengan surat paksa, yang didalamnya disajikan Kebijakan Penagihan tahun 2008, juga realisasi penambahan tunggakan pajak dan kegiatan penagihan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan maka penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penagihan pajak dengan surat paksa pada kantor pajak dapat dilakukan Pendekatan persuasif yaitu dengan menghimbau para Wajib Pajak yang masih mempunyai tunggakan agar segera melunasi tunggakan pajaknya tersebut, Namun apabila pendekatan persuasif tersebut belum juga mendapat respon dari Wajib Pajak untuk segera melunasinya, maka Pihak KPP menindaklanjuti dengan Pelaksanaan Penagihan Aktif yaitu dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sampai dengan pelaksanaan Lelang.
2. Kegiatan penagihan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, merupakan ujung tombak terakhir agar hutang pajak/tunggakan pajak dari penanggung pajak dapat cair dalam artian lunas dan terealisasi menjadi penerimaan negara sehingga dapat digunakan untuk kepentingan rakyat.
3. Dilihat dari Kebijakan Penagihan Pajak pertahun, sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan solusi terbaik cara untuk meningkatkan keefektifan penagihan pajak dengan melaksanakan pemblokiran rekening Penanggung Pajak. Karena dengan memblokir rekening, otomatis menghambat aktifitas perusahaan dalam pendanaan, sehingga memaksa perusahaan untuk membayar hutang pajaknya dengan cepat.
4. Sebenarnya tindakan yang diakhiri dengan pelelangan sangat dihindari oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena banyak kekurangan yang didapat dari pelaksanaan lelang seperti :

- a. Biaya tinggi karena harus membuat pengumuman pada surat kabar belum lagi penitipan barang yang akan dilelang.
 - b. Jika pemenang lelang wan prestasi, maka Dirjen Pajak sebagai pemohon lelang harus melaksanakan lelang ulang.
 - c. Susahnya mendapatkan barang lelang yang masih bernilai tinggi karena biasanya aset yang diberikan Penanggung Pajak usia manfaatnya telah habis.
5. Hambatan yang dihadapi Jurusita Pajak ternyata tidak hanya datang dari Penanggung Pajak, tetapi juga dari Kantor Pelayanan Pajak sendiri. Sehingga banyak tindakan penagihan pajak yang dilakukan pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dari tahun 2008 s.d Tahun sebelumnya meleset dari target prestasi Jurusita yang telah ditetapkan pada Kebijakan Penagihan pada tahun 2008.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pengamatan penulis, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat menekankan kepada para karyawan diseluruh indonesia terutama yang berada di seksi penagihan agar menyadari bahwa tanpa kegiatan penagihan, rencana penerimaan yang dihasilkan dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang telah jatuh tempo, tidak akan pernah terrealisasi dalam jumlah rupiah yang real sehingga tidak dapat dipakai untuk kepentingan pembangunan.
2. Jurusita Pajak, diharapkan jeli dan cepat tanggap dalam melakukan tindakan penagihan. Dahulukan Wajib Pajak/Penunggak Pajak yang mempunyai tunggakan pajak terbesar di wilayah kerjanya, jangan takut melakukan berbagai tindakan penagihan yang telah jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

karena tujuannya adalah menjadikan utang pajak cair/lunas selain itu juga untuk memenuhi target prestasi Jurusita dimana setiap target dipenuhi maka insentif sebagai Jurusita juga akan dibayarkan.

3. Agar pelaksanaan lelang tidak menjadi bumerang bagi Jurusita, sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak melaksanakan Pemeriksaan untuk tujuan Penagihan Pajak (*Deliquency Audit*). Dimana tujuan pemeriksaan ini seperti tercantum dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.75/2002 tanggal 17 Juli 2002 adalah untuk memperoleh data, keterangan dan bukti yang berkaitan dengan :
 - a. Harta Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang dimiliki pada tahun berjalan
 - b. Proses timbulnya tunggakan pajak berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan dan atau Berita Acara Pemeriksaan
 - c. Kegiatan penagihan aktif yang telah dilakukan
 - d. Upaya hukum yang dilakukan Wajib Pajak, seperti pengajuan keberatan, banding atau peninjauan kembali
 - e. Agar para Jurusita lebih semangat melakukan tugas penagihan pajak, diharapkan Kepala Kantor sebagai pejabat penanggung jawab, Kepala Seksi Penagihan membangun kerjasama yang baik, terlebih menyangkut kendaraan dinas, contohnya dalam penyampaian surat paksa, Jurusita perlu membawa mobil dinas karena harus membawa sekurangnya dua orang saksi yang dikenal dan dapat dipercaya oleh Jurusita. Kerjasama ini juga menyangkut pemberian dorongan moril dan saran juga perlindungan jika Jurusita menghadapi kesulitan di lapangan dimana Wajib Pajak menyewa jasa preman/ *bodyguard* untuk menghalau kedatangan Jurusita ke tempat tinggal/ tempat usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, 2003. Perpajakan. Edisi Revisi, Penerbit Andi Offset Multi, Yogyakarta
- Munawir, 1999, Perpajakan, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Tanya-Jawab Penagihan Paksa Oleh Jurusita Pajak Pusat Dan Daerah (Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- PT. Salemba Emban Patria. 2001. *Undang-undang Pajak Tahun 2000*, Salemba Empat, Jakarta.
- Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak. 2005. *Pedoman Penagihan Pajak*, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta
- Hadi, H. Mulyo, 2001 *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat Dan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sihaan, Marihot Pahala, 2004 *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Drs. Waluyo M.Sc. M.M. Akt, 2002 *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta
- Wirawan, B. Ilyas, 2007. *Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suandy, Erly, 2000. *Perpajakan*, Salemba Empat (PT. Salemba Emban Patria), Jakarta
- Diana, Anastasia, 2004. *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Andi offset, Yogyakarta.
- Siahaan, marihotPahala, 2004. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta.
- Drs. B. Boediono, M.Si, 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Muljono, Djoko, 2007. *Pemotongan Pemungutan PPh dan PPh Pasal 25/29 Lengkap Dengan Undang-Undang, CV. Andi Offset*, Yogyakarta.
- Burton, Richard, 2009. *Kajian Aktual Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
I.I Laporan Kegiatan Penagihan pada Kantor Pelayanan PajakPratama Pekanbaru Senapelan Triwulan I (Januari s.d Maret) Tahun 2008.....	46
I.II Laporan Kegiatan Penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan Triwulan II (April s.d Juni) Tahun 2008	46
I.III Laporan Kegiatan Penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan Triwulan III (Juli s.d September) Tahun 2008	47
I.IV Laporan Kegiatan Penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan (Oktober s.d Desember) Tahun 2008	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
II.I Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan...	16